

**PELAKSANAAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
(Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat)**

FAJAR ADE PUTRA

NPP. 31.0588

Asdaf Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: fajaradeputra18@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Wiwik Roso Sri Rejeki, M. AP

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The implementation of IKD in Ketapang is low and far from the national target of 25% of the total recording of KTP-El and this is caused by several factors. Because the IKD program is relatively new and the community does not know about the IKD program itself, the application of IKD in Ketapang is still low. Not all people also have digital devices, in this case mobile phones or gadgets used to access IKD. Even people who have mobile phones still do not understand and do not understand the purpose of IKD. Referring to the aggregate population data of Ketapang Regency based on mandatory KTP and KTP-el Recording in Ketapang Regency still experiencing gaps* **Purpose:** *To determine and analyze how the implementation of Digital Population Identity activation at the Population and Civil Registration Office of Ketapang Regency, West Kalimantan Province, which is reviewed from six dimensions, namely leadership, attitude and morale, communication, encouragement, supervision, and discipline.* **Methods:** *This research uses descriptive qualitative with an inductive approach which aims to obtain data in accordance with the real situation in the field. In collecting data, the research used several methods, namely observation, interviews, and documentation.* **Results:** *Based on the results of this study showed: 1) a) Leadership has been achieved, because in general the ability of employees is very good in giving directions and orders; 2) Attitude and Morale have been successfully achieved, because employees provide services very well; 3) Communication has been successfully achieved, because two indicators have been implemented well; 4) Encouragement has been successfully achieved, because the indicators are implemented well; 5) Supervision has been successfully achieved; 6) Discipline has not been successfully achieved, because it is caused by several factors. Researchers also obtained research results related to inhibiting factors and interviewed informants regarding efforts to overcome inhibiting factors.* **Conclusion:** *The implementation of Digital Population Identity (IKD) activation at the Ketapang Regency Population and Civil Registration Office has been running well, but there are still inhibiting factors related to implementation, especially the low public awareness of the importance of digital population identity, there are still people in Ketapang Regency who do not have a device which is one of the requirements for activating digital population identity. In addition, there is no urgent need to use digital identity. Researchers also conducted observations and interviews to find out the efforts of the Ketapang Regency Population and Civil Registration Office to overcome the existing inhibiting factors.*

Keywords: *Digital Population Identity, Office of Population and Civil Registration, Implementation*

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penerapan IKD di Ketapang yang rendah dan jauh dari dari target nasional yaitu 25% dari total perekaman KTP-EI dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dikarenakan program IKD ini terbilang baru dan masyarakat belum mengetahui tentang program IKD itu sendiri mengakibatkan penerapan IKD di Ketapang masih rendah. Tidak semua masyarakat juga memiliki perangkat digital dalam hal ini telepon genggam atau gawai yang digunakan untuk mengakses IKD. Bahkan masyarakat yang memiliki telepon genggam pun masih tidak paham dan tidak mengerti tujuan dari IKD. Merujuk pada data agregat kependudukan Kabupaten Ketapang berdasarkan wajib KTP dan Perekaman KTP-el yang ada di Kabupaten Ketapang masih mengalami kesenjangan **Tujuan:** 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang ditinjau dari enam dimensi yaitu kepemimpinan, sikap dan moril, komunikasi, pendorong, supervisi, dan disiplin. **Metode:** Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk memperoleh data sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Dalam mengumpulkan data penelitian menggunakan beberapa cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil:** Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan: 1) a) Kepemimpinan telah tercapai, karena secara umum kemampuan pegawai sudah sangat baik dalam memberikan arahan dan perintah; 2) Sikap dan Moril sudah berhasil tercapai, karena pegawai memberikan pelayanan dengan sangat baik; 3) Komunikasi sudah berhasil dicapai, karena dua indikator telah dilaksanakan dengan baik; 4) Pendorong berhasil tercapai, karena indikator dilaksanakan dengan baik; 5) Supervisi sudah berhasil tercapai; 6) Disiplin belum berhasil tercapai, karena disebabkan oleh beberapa faktor. Peneliti juga memperoleh hasil penelitian terkait faktor penghambat dan mewawancarai informan terkait upaya mengatasi faktor penghambat. **Kesimpulan:** Pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat faktor penghambat terkait pelaksanaan khususnya rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan digital, masih adanya masyarakat Kabupaten Ketapang yang belum memiliki gawai yang merupakan salah satu syarat aktivasi identitas kependudukan digital. Selain itu, belum adanya kepentingan yang mendesak dalam penggunaan identitas kependudukan digital. Peneliti juga melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang mengatasi faktor penghambat yang ada.

Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelaksanaan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman digital saat ini, kemajuan teknologi dan digitalisasi mengacu pada perkembangan dan adopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah administrasi pemerintahan. Digitalisasi adalah proses mengubah data atau informasi dari bentuk analog menjadi format digital. Digitalisasi mengonversi informasi atau data dari bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca oleh manusia menjadi format yang dapat diproses dan disimpan oleh perangkat secara digital. Digitalisasi KTP menjadikan pengelolaan identitas kependudukan menjadi efektif dan efisiensi serta dapat mempercepat proses administrasi dalam penerbitannya. Pengurangan waktu dan biaya dalam penerbitan dan pengelolaan KTP dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan suatu inovasi terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Kehadiran IKD dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan yang sering

dikeluarkan oleh masyarakat terkait penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

Program identitas kependudukan digital bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi potensi pemalsuan identitas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sistem secara digital tentunya akan memberikan pengawasan dan kontrol yang lebih ketat terhadap integritas data dan keabsahan dokumen. Program IKD juga dimaksudkan untuk mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal digitalisasi kependudukan, meningkatkan penggunaan digitalisasi kependudukan bagi masyarakat, menyederhanakan dan mempercepat layanan publik atau swasta secara digital, serta menjaga keamanan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi yang efektif dalam mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penerapan IKD di Kabupaten Ketapang baru mulai dilaksanakan pada awal tahun 2023 yaitu tepatnya pada bulan Januari. Dalam pelaksanaannya, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih sangat jauh dari target nasional yaitu 25% dari total perekaman KTP-el. Penerapan IKD di Ketapang yang rendah dan jauh dari target nasional ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dikarenakan program IKD ini terbilang baru dan Masyarakat belum mengetahui tentang program IKD itu sendiri mengakibatkan penerapan IKD di Ketapang masih rendah. Tidak semua masyarakat juga memiliki perangkat digital dalam hal ini telepon genggam atau gawai yang digunakan untuk mengakses IKD. Bahkan masyarakat yang memiliki telepon genggam pun masih tidak paham dan tidak mengerti tujuan dari IKD. Merujuk pada data agregat kependudukan Kabupaten Ketapang berdasarkan wajib KTP dan Perekaman KTP-el yang ada di Kabupaten Ketapang masih mengalami kesenjangan.

Total penduduk Kabupaten Ketapang yang wajib KTP berjumlah 457.025 jiwa, yang sudah melaksanakan perekaman KTP-el sebanyak 369.215 jiwa dan capaian IKD di Kabupaten Ketapang baru mencapai 4.061 jiwa atau 1,09%. Capaian ini tentu tergolong masih sangat rendah mengingat target nasional capaian IKD yaitu 25% dari perekaman KTP-el.

Hambatan dalam pelaksanaan aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diantaranya yaitu kurangnya keinginan masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD dikarenakan ketidakpahaman masyarakat tentang apa itu IKD, dan dari hasil observasi literasi digital Masyarakat juga rendah. Selain itu dalam melaksanakan aktivasi IKD masyarakat juga memerlukan gawai dengan versi *android* dan *ios* tetapi tidak semua masyarakat memiliki gawai dengan versi tersebut, dan terkadang terjadi gangguan pada sistem pusat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Komparasi penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya mengenai topik pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital dapat dijadikan referensi pendalaman penelitian. Berdasarkan penelitian oleh Agus Widiyarta dan Isni Humaidah tahun 2023 berjudul Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Surabaya yang membahas tentang pelaksanaan aktivasi IKD yang sudah berjalan dengan baik. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik yang digunakan dalam pengambilan data ialah dengan wawancara, kuisisioner, pengamatan dan teknik data sekunder (Widiyarta & Humaidah, 2023).

Penelitian berjudul Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Milenial-Gen Z: Investigasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia Tahun 2023 oleh Alfarizi dan didapatkan hasil yang sudah cukup baik. Menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif serta teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi (Alfarizi, 2023).

Judul penelitian Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya Tahun 2023 oleh Moch. Andre Firmansyah dan Rosyidatuzzahro Anisykurlillah mengetahui dan menganalisis Efektivitas Program Pelayanan

Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. Metode yang penelitian kuantitatif deskriptif yang dianalisis mulai pengumpulan data, reduksi, penyajian hingga penarikan kesimpulan (Firmansyah & Anisykurlillah, 2023).

Penelitian Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung Tahun 2023 yang dilakukan oleh Restu Widyo Sasongko yang menekankan pada penerapan IKD di Kabupaten Bandung. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi (Sasongko, 2023).

Agnes Tukan dan Annisa Rahmadanita dalam skripsi berjudul Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 berfokus pada implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata. Metode yang dipakai kualitatif deskriptif serta data yang diambil yaitu primer dan sekunder dari survei dan *library research*, teknik dokumentasi dan wawancara, dianalisis dengan reduksi, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan (Tukan & Rahmadanita, 2023).

Penelitian berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan KTP Elektronik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 oleh Asmarani Hindi membahas topik evaluasi pelaksanaan pelayanan ktp elektronik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Metode yang penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang dianalisis mulai pengumpulan data, reduksi, penyajian hingga penarikan kesimpulan (Hindi, 2023).

Ikhsan Bagus Permadi dan Ali Rokhman dalam skripsi Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengaman Data Pribadi Tahun 2023 berfokus penerapan Identitas Kependudukan Digital untuk upaya pengaman data pribadi. Lokasi dilakukan penelitian yaitu pada Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Metode yang dipakai kualitatif deskriptif serta data yang diambil yaitu primer dan sekunder serta menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara, dianalisis dengan reduksi, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan (Permadi & Rokhman, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Anryana, Ahmad Yamin, dan M. Nur Fietroh pada tahun 2023 yaitu Penerapan *E-Government* Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. Fokus penelitian ini yaitu membahas penerapan *e-government* melalui aplikasi identitas kependudukan digital yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sementara itu, untuk teknik pengambilan data menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara, dianalisis juga dengan reduksi, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan (Anryana et al, 2023).

A. Yulanda dan A. Frinaldi melakukan penelitian skripsi dengan judul Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan di Indonesia pada tahun 2023. Membahas tentang pentingnya program identitas kependudukan digital. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sementara itu, Teknik pengambilan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan (Yulanda & Frinaldi, 2023).

Penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak yang dilakukan oleh Dwi Vira Safitri pada tahun 2023 yang berfokus pada kajian terkait partisipasi masyarakat Gunung Anyar Tambak terhadap penggunaan identitas kependudukan digital. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu, teknik pengambilan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi (Safitri, 2023).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni lebih memfokuskan pelaksanaan aktivasi IKD. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi oleh George R. Terry dalam Nugroho (2015:17) yang memiliki enam dimensi yaitu kepemimpinan, sikap dan moril, komunikasi, pendorong, supervisi, dan disiplin.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, yang dilakukan studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Penyelidikan terkait pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital ini ditekankan pada dimensi-dimensi kepemimpinan, sikap dan moril, komunikasi, pendorong, supervisi, dan disiplin.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam mengenai fenomena yang sedang dihadapi oleh objek pelaksanaan aktivasi IKD secara komprehensif dengan menjabarkannya dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan metode-metode ilmiah untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode eksploratif yang meliputi pengumpulan dan penyusunan data yang dianalisis dan diinterpretasi dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan dan mencari ide baru dalam merumuskan masalah mengenai pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Peneliti melakukan pengukuran terkait pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang merujuk pada teori implementasi menurut George R. Terry dalam Nugroho (2015:17) mengetahui pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

3.1.1 Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut George R. Terry dalam Nugroho (2015:17) tidak hanya berfokus pada atribut pribadi seorang pemimpin tetapi juga pada proses dan interaksi yang terjadi antara pemimpin dan pengikutnya. Ini menekankan pentingnya komunikasi, keterampilan interpersonal, dan manajemen sumber daya manusia dalam mencapai kepemimpinan yang efektif.

1. Gaya Kepemimpinan

Indikator ini dapat dikatakan bahwa sudah dilaksanakan dengan gaya humanis dan ikut terlibat langsung dalam kegiatan tersebut hal itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan kontrol terhadap permasalahan yang akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital dilakukan dengan mendorong orang lain untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. bahwa gaya kepemimpinan yang melayani serta ikut secara langsung dan memberikan contoh dalam pelaksanaan aktivasi identitas

kependudukan digital merupakan gaya yang sangat sesuai untuk membangun hubungan kerja sama yang baik dan menjadi contoh yang baik.

2. Kemampuan Memberikan Arahan Dan Memotivasi

Indikator berikutnya adalah kemampuan dalam memberikan arahan dan motivasi, dimana dalam pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital dilakukan dengan memberikan hadiah atau penghargaan kepada pegawai yang berkinerja dengan baik serta dalam memberikan arahan atau perintah dilakukan dengan sejasal mungkin agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Indikator kepemimpinan dalam memberikan arahan dan motivasi pada pelaksanaan aktivasi kependudukan digital dilakukan dengan kompetisi antar pegawai melalui hasil predikat kinerja dengan sangat baik, bagi pegawai terbaik akan diberikan hadiah sebagai bentuk motivasi dan dorongan dari pimpinan.

3.1.2 Sikap dan Moril

Menurut George R. Terry dalam Nugroho (2015:17), sikap dan moral sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Pemimpin yang efektif harus mampu mengelola dan mempengaruhi sikap serta moral anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal dan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Sikap Serta Etika Pelayanan

Pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital yaitu dengan menerapkan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun atau yang dikenal dengan 5 S. Sikap dan etika senyum, salam, sapa, sopan dan santun atau 5 S merupakan sikap yang harus ditonjolkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahkan sikap 5 S tersebut dimasukan dalam standar operasional prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

2. Respon Masyarakat Menerima Pelayanan

Indikator kedua yaitu respon masyarakat menerima pelayanan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa respon positif masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan adalah berupa membantu dalam penyebaran informasi kepada masyarakat Kabupaten Ketapang terkait dengan pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital. Respon positif masyarakat ditunjukkan dengan antusiasme dalam aktivasi identitas kependudukan digital bila dibandingkan dengan pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Penerapan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun memberikan respon positif dari masyarakat dapat berupa peningkatan kesadaran tentang tertib administrasi kependudukan sehingga pada akhirnya masyarakat secara sukrela dan semangat melakukan aktivasi identitas kependudukan penduduk secara luas.

3.1.3 Komunikasi

George R. Terry dalam Nugroho (2015:17) menekankan bahwa komunikasi adalah alat vital dalam manajemen yang mempengaruhi setiap aspek operasional organisasi. Pemimpin dan manajer harus menguasai seni komunikasi untuk memastikan efektivitas organisasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Penyaluran Informasi

Penyebaran informasi pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital dilakukan dengan menggunakan media sosial serta penyaluran informasi kepada masyarakat yang sedang mengurus tertibnya administrasi penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Penyaluran informasi pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital adalah dengan menggunakan media sosial, website resmi dinas dan penyampaian informasi secara langsung melalui sosialisasi.

2. Kejelasan Informasi Yang Diberikan Kepada Masyarakat Menerima Pelayanan

Indikator kedua yaitu kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat menerima pelayanan merujuk pada kejelasan informasi menjadi hal yang sangat penting dalam penyaluran informasi dalam pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital. Kejelasan informasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sangat jelas khususnya terkait dengan aktivasi identitas kependudukan digital serta terdapat dalam website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Kejelasan informasi aktivasi identitas kependudukan digital telah dimuat dalam media digital maupun media massa menjadi penyaluran informasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

3.1.4 Pendorong

Menurut George R. Terry dalam Nugroho (2015:17), pendorong (motivator) adalah faktor-faktor yang merangsang, memelihara, dan mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi adalah elemen penting dalam manajemen, karena tingkat motivasi karyawan sangat mempengaruhi produktivitas, kinerja, dan kepuasan kerja. Pendorong adalah proses yang kompleks dan multifaset yang memerlukan pendekatan holistik untuk memahaminya. Pemimpin yang efektif harus mengenali dan merespons berbagai kebutuhan dan pendorong karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan.

1. Motivasi Dari Pimpinan

Motivasi dari pimpinan dalam pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital yaitu berupa pemberian hadiah bagi pegawai teladan yang mampu menjaga produktivitasnya. Pemberian hadiah kepada pegawai teladan merupakan bentuk motivasi dari pimpinan dalam menjaga dan meningkatkan semangat pegawai dalam pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

2. Usaha Meningkatkan Produktivitas Pelayanan Yang Diberikan Kepada Masyarakat

Usaha meningkatkan produktivitas pelayanan dalam pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital dilakukan dengan memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana terbaik untuk mempercepat pelayanan seperti laptop atau pc serta jaringan internet yang cepat dan stabil. Selain itu, usaha untuk meningkatkan produktivitas ialah memberikan pelatihan berkala kepada pegawai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka terkait dengan tugas-tugas pelayanan.

3.1.5 Supervisi

Menurut George R. Terry dalam Nugroho (2015:17) supervisi adalah proses mengarahkan, memimpin, dan mengawasi pekerjaan bawahan untuk memastikan bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab mereka dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Supervisi berfokus pada hubungan interpersonal antara supervisor dan karyawan serta bagaimana supervisor dapat memotivasi, mendukung, dan membimbing karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan supervisi yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa tujuan dan sasaran tercapai dengan cara yang efisien dan produktif, serta karyawan merasa didukung dan dihargai dalam peran mereka.

1. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan aktivasi identitas kependudukan digital dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu bulan hal tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Evaluasi pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital

terdapat kendala yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus identitas kependudukan digital. Evaluasi bertujuan untuk menjaga produktivitas pelayanan serta kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Kegiatan evaluasi dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan khususnya aktivasi identitas kependudukan digital.

2. Kesesuaian Dengan SOP

Kesesuaian dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) berarti menjalankan suatu kegiatan atau proses sesuai dengan pedoman atau prosedur standar yang telah ditetapkan. SOP adalah dokumen yang berisi instruksi terperinci tentang bagaimana tugas atau operasi tertentu harus dilakukan untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas. Kesesuaian dengan SOP penting untuk mencapai hasil yang diharapkan dan meminimalkan risiko kesalahan. Pelayanan yang diberikan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan merupakan hasil dari adanya evaluasi kegiatan yang dilakukan. Evaluasi pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital terdapat kendala yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus identitas kependudukan digital, meskipun begitu pelaksanaan kegiatan aktivasi identitas kependudukan digital berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

3.1.6 Disiplin

Menurut George R. Terry dalam Nugroho (2015:17) disiplin adalah kondisi di mana karyawan mengikuti aturan dan peraturan organisasi serta menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Disiplin mencakup kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan standar yang ditetapkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Disiplin merupakan elemen penting dalam manajemen karena tanpa disiplin, organisasi akan menghadapi kekacauan dan ketidakefisienan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip disiplin yang efektif, organisasi dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif.

1. Kecepatan Serta Ketepatan Waktu

Kecepatan dan ketepatan waktu dipengaruhi oleh kelancaran server di pusat. Selain itu adanya aturan terkait aktivasi identitas kependudukan digital sejauh ini pelayanan yang kami berikan memiliki tingkat integritas yang cukup tinggi sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan tergantung dari semua ketentuan yang telah dipenuhi. Jika ada ketentuan yang belum terpenuhi maka prosesnya akan memakan waktu yang lebih lama karena harus menunggu sampai dengan semua ketentuannya terpenuhi, hal itu menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap aturan yang cukup tinggi. Terdapat gangguan server yang terkadang menyebabkan molornya pengerjaan dalam pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital, selain itu juga terdapat adanya ketidaksesuaian data yang menyebabkan terlambatnya pengerjaan. Pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital memiliki kecepatan dan ketepatan waktu jika persyaratan sudah dimiliki semua maka proses aktivasi dalam waktu satu hari sudah bisa dilakukan.

2. Kepatuhan Dengan Aturan

Adanya aturan terkait aktivasi identitas kependudukan digital sejauh ini pelayanan yang kami berikan memiliki tingkat integritas yang cukup tinggi sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan tergantung dari semua ketentuan yang telah dipenuhi. Jika ada ketentuan yang belum terpenuhi maka prosesnya akan memakan waktu yang lebih lama karena harus menunggu sampai dengan semua ketentuannya terpenuhi, hal itu menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap aturan yang cukup tinggi. Ketidaktepatan waktu dalam pengerjaan biasanya disebabkan oleh rusaknya komputer atau laptop yang dimiliki oleh operator, selain itu tingginya tingkat kepatuhan terhadap peraturan membuat cukup lamanya prosedur yang

diikuti.

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan digital, masih adanya masyarakat Kabupaten Ketapang yang belum memiliki gawai yang merupakan salah satu syarat aktivasi identitas kependudukan digital. Selain itu, faktor penghambat pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital yaitu adanya masyarakat yang belum memiliki *handphone*, masyarakat malas menyimpan aplikasi identitas kependudukan digital serta belum adanya kepentingan yang mendesak dalam penggunaan identitas digital merupakan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital. Sistem dari pusat yang terkadang masih mengalami gangguan ketika masyarakat melaksanakan aktivasi identitas kependudukan digital juga dinilai menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

3.3 Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dalam Mengatasi Faktor Penghambat

Adanya faktor penghambat dalam menentukan pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital menuntut suatu pemikiran untuk dapat mencari solusi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada pelayanan dapat mencakup serangkaian langkah atau tindakan yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mengurangi, atau menghilangkan faktor-faktor yang menghambat proses pelayanan. Adapun upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebaran informasi juga dapat melalui media sosial dan media cetak agar masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut. Selain itu, juga dilakukan peningkatan terhadap kualitas jaringan internet di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Karena kualitas jaringan internet sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital dan untuk itu wajib ditingkatkan demi keberhasilan pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Ketapang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang juga melakukan kerja sama dengan pihak sekolah – sekolah maupun pabrik sebagai program jemput bola perekaman KTP dan aktivasi identitas kependudukan digital.

3.4 Diskusi Temuan Utama

Pada penelitian sebelumnya perbedaan utama yang mencolok adalah konsep yang digunakan serta lokasi penelitian yang berbeda. Pada penelitian Agus Widiyarta dan Isni Humaidah tahun 2023 berjudul Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Surabaya yang membahas tentang pelaksanaan aktivasi IKD yang sudah berjalan dengan baik. Perbedaan dengan penelitian saat ini ialah konsep dan lokus dari penelitian tersebut. Penelitian Agus Widiyarta dan Isni Humaidah menggunakan teori implementasi dan lokus berada di Kota Surabaya (Widiyarta & Humaidah, 2023).

Sedangkan pada penelitian berjudul Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Milenial-Gen Z: Investigasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia Tahun 2023 oleh Alfarizi dan didapatkan hasil yang sudah cukup baik serta perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu konsep yang digunakan. Sedangkan persamaannya ialah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif (Alfarizi, 2023).

Judul penelitian Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya Tahun 2023 oleh Moch. Andre Firmansyah dan Rosyidatuzzahro Anisykurlillah mengetahui dan menganalisis efektivitas program pelayanan identitas kependudukan digital di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya yang sudah berjalan dengan baik. Untuk perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu menggunakan konsep penelitian efektifitas dan lokus pada Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. Sedangkan untuk persamaannya yaitu berkaitan penelitian tentang identitas kependudukan digital (Firmansyah & Anisykurlillah, 2023).

Penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak yang dilakukan oleh Dwi Vira Safitri pada tahun 2023 yang berfokus pada kajian terkait partisipasi masyarakat Gunung Anyar Tambak terhadap penggunaan identitas kependudukan digital. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada lokus penelitian dan konsep / teori penelitian. Sedangkan persamaannya terdapat pada objek yang diteliti yaitu identitas kependudukan digital (Safitri, 2023).

Penelitian Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung Tahun 2023 yang dilakukan oleh Restu Widy Sasongko yang menekankan pada penerapan IKD di Kabupaten Bandung. Untuk perbedaan dengan penelitian saat ini adalah tahun dilakukannya penelitian dan lokus penelitian tersebut dan persamaannya yaitu meneliti identitas kependudukan digital dan metode penelitian yang digunakan (Sasongko, 2023). Agnes Tukan dan Annisa Rahmadanita dalam skripsi berjudul Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 berfokus pada implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata. Perbedaan dengan penelitian saat ini ialah lokus penelitian dan tahun dilaksanakan penelitian serta persamaan yang terdapat yaitu meneliti terkait identitas kependudukan digital dan metode penelitian yang digunakan (Tukan & Rahmadanita, 2023).

Penelitian berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan KTP Elektronik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 oleh Asmarani Hindi membahas topik evaluasi pelaksanaan pelayanan ktp elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu objek penelitian yaitu KTP Elektronik dan lokus dilakukannya penelitian. Persamaannya yaitu meneliti terkait pelaksanaan dalam bidang administrasi kependudukan (Hindi, 2023). Sedangkan Ikhsan Bagus Permadi dan Ali Rokhman dalam skripsi Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengaman Data Pribadi Tahun 2023 berfokus penerapan Identitas Kependudukan Digital untuk upaya pengaman data pribadi yang memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini yaitu metode yang digunakan dan objek yang diteliti yaitu identitas kependudukan digital. Hanya saja terdapat perbedaan di lokus penelitian yaitu di Kabupaten Banyumas (Permadi & Rokhman, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Anryana, Ahmad Yamin, dan M. Nur Fietroh pada tahun 2023 yaitu Penerapan *E-Government* Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. Fokus penelitian ini yaitu membahas penerapan *e-government* melalui aplikasi identitas kependudukan digital. Untuk perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu lokus penelitian yang dilaksanakan yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat dan konsep penelitian yang digunakan. Sedangkan persamaanmnya yaitu meneliti terkait identitas kependudukan digital (Anryana et al, 2023). Sementara itu, A. Yulanda

dan A. Frinaldi melakukan penelitian skripsi dengan judul Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan di Indonesia pada tahun 2023. Membahas tentang pentingnya program identitas kependudukan digital. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu terdapat pada lokus penelitian yang dilakukan dan konsep penelitian yang dipakai. Sedangkan persamaannya yaitu metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif (Yulanda & Frinaldi, 2023).

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa Aktivasi Identitas Kependudukan dan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Sudah dilaksanakan dengan baik dari enam indikator pada teori pelaksanaan oleh George R. Terry dalam Nugroho (2015:17) yang menjadi acuan atau pedoman dalam penelitian tetapi belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan target nasional. Hambatan dalam pelaksanaan aktivasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diantaranya yaitu kurangnya keinginan masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD dikarenakan ketidakpahaman masyarakat tentang apa itu IKD, dan dari hasil observasi literasi digital Masyarakat juga rendah. Selain itu dalam melaksanakan aktivasi IKD masyarakat juga memerlukan gawai dengan versi *android* dan *ios* tetapi tidak semua masyarakat memiliki gawai dengan versi tersebut, dan terkadang terjadi gangguan pada sistem pusat.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dalam mengatasi hambatan untuk meningkatkan Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yaitu dengan memberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital kepada masyarakat melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial atau pada saat masyarakat melakukan perekaman KTP juga diarahkan untuk mengakses dan melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu, dikarenakan pada pelaksanaannya hanya diberikan waktu oleh lembaga selama 2 minggu, sedangkan pada umumnya penelitian dilaksanakan minimal 1 bulan agar benar – benar mendapatkan data yang akurat.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*): Peneliti menyadari keterbatasan temuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama dan berkaitan dengan topik pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mendapatkan hasil yang mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW atas limpahan Syafaat-Nya. Terima kasih untuk doa, motivasi, dan bantuan yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, keluarga besar, dan penyejuk hati yang senantiasa tercurahkan. Peneliti juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada selaku dosen pembimbing yang sabar dan semangat memberikan ilmu, serta seluruh keluarga besar IKAPTK Kabupaten Ketapang yang telah membantu selama proses penelitian, Saudara Kontingen Kalimantan Barat Angkatan XXXI serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, R. (2015). Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Alfarizi, M. 2023. Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Milenial-Gen Z: Investigasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 41-54. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.41-54>

Anryana, Yamin, A., & Fietroh, Muh. Nur. 2023. Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 188-193. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3619>

Firmansyah, M. A., & Anisykurlillah, R. 2023. Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 510-517. <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.8412238.svg>

Hindi, Asmarani. 2023. Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Ktp Elektronik Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat *jurnalregistratie*, 5(1), <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3119>

Permadi, I. B., & Rokhman, A. . 2023. Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengaman Data Pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy And Administration*, 4(2), <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>

Safitri, D. V., 2023. Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 9(2), <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i2.6870>

Sasongko, R. S., 2023. Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *jurnalregistratie*, 5(1), <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>

Tukan, A., & Rahmadanita, A. . 2023. Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *jurnalregistratie*, 5(2), <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717>

Widiyarta, A., & Humaidah, I. 2023. Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43-51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>

Yulanda, A., & Frinaldi, A. . 2023. Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(2), 415-426. <https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.30348>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan